

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pengujian

Pemda desa wajib mempunyai sebuah rancangan yang strategis, supaya mampu menumbuhkan perekonomian beserta mengoptimalkan sumber daya dengan mendayagunakan berbagai macam potensi desa yang dimiliki melalui pendirian beserta pengaturan Badan bisnis Milik Desa (BUMDes). Badan bisnis Milik Desa (BUMDes) ialah Badan bisnis yang dibuat oleh pemerintah desa yang sebagian besar modalnya berasal dari dana desa beserta warga desa. BUMDes dijadikan menjadi unit bisnis untuk menggali potensi beserta kapabilitas desa beserta warga supaya bisa mendorong keperluan warga dengan umum demikian mampu mensejahterakan warga desa. Pendirian BUMDes ialah perihal yang krusial yang sudah dicantumkan dalam Undang- Undang Desa. Dalam pendirian BUMDes Pemda desa ataupun direktur mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penyajian data pelaporan keuangan yang sama dengan standarisasi akuntansi dengan umum supaya mudah dimengerti oleh sejumlah oknum yang memerlukan menjadi penarikan putusan. sehingga dari itu, dalam sebuah kelompok ataupun emiten sangat dianjurkan untuk menjabarkan laporan temuan kewajiban yang dibuat dengan baik beserta betul beserta mudah dipahami.

Provinsi Bali ialah satu diantara Provinsi yang tidak mempunyai desa dengan status tertinggal beserta desa sangat tertinggal, perihal ini dinyatakan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan wilayah Tertinggal beserta Transmigrasi pada tahun 2021. perihal tersebut pula tidak luput dari kontribusi Badan bisnis Milik

Desa (BUMDes) yang cukup dominan di desa-desa Bali. Tercatat terdapat 588 BUMDes di Bali dengan omzet menggapai Rp 247,98 Miliar pada tahun 2020 (www.cnn.indonesia.com).

Satu diantara kabupaten di Bali yang memakai BUMDes menjadi satu diantara strategi untuk bisa memperkuat bisnis rakyat ialah kabupaten Badung. Pemda Kabupaten Badung mempunyai Strategi Kerja Kolaboratif Terpadu Inklusi Keuangan Badung, Pemda Kabupaten Badung melalui Dinas pendayagunaan warga beserta Desa (DPMD) Kabupaten Badung menumbuhkembangkan pembaruan PUSAKA SAKTI BADUNG. pembaruan ini mengungkap satu diantara persoalan yang terdapat di warga desa dalam menumbuh kembangkan usaha, terutamanya bisnis ultra mikro. yang mana yang menjadi hambatan pokok bagi pengembangan bisnis ultra mikro ialah bagian permodalan. bisnis Ultra Mikro ialah bisnis mikro yang dipunyai oleh individu perorangan. Beberapa contoh bisnis mikro yakni laundry kiloan, bisnis kuliner rumahan, fashion online shop, bisnis souvenir, hantaran, beserta mahar pernikahan, toko kelontong online, jual ayam potong, bisnis minuman kemasan unik, warmindo, waralaba makanan beserta minuman, beserta bisnis sayuran organik. cenderung lanjut dituturkan, ketentuan yang terkandung dalam kebijakan Menteri Keuangan No. 193/PMK.05/2018 terkait Pembiayaan Ultra Mikro. perihal ini yang menghambat akses pada berbagai layanan keuangan formal. PUSAKA SAKTI BADUNG ialah strategi pendayagunaan BUMDes yang dibuat oleh warga Desa melalui Musyawarah Desa. Salah satu fungsi pembentukan BUMDes sebagaimana terkandung dalam kebijakan Pemda No. 11 Tahun 2021 terkait Badan bisnis Milik Desa (BUMDes) ialah satu diantara strategi menciptakan inkubasi, stimulasi

beserta dinamisasi bisnis ekonomi warga Desa. menjadi strategi penguatan pada penerapan pembaruan PUSAKA SAKTI BADUNG, Dinas pendayagunaan warga beserta Desa Kabupaten Badung akan membuat kebijakan Bupati terkait BUMDes menjadi bagian dari inklusi beserta literasi keuangan di Desa (<https://badungkab.go.id/>). Dalam menciptakan program tersebut sehingga diperlukan peran beserta dari komponen BUMDes untuk bisa mengatur keuangan ataupun dana desa demikian bisa memberi bantuan permodalan langsung pada warga yang mana permodalan ialah satu diantara persoalan warga dalam menumbuhkembangkan usaha. Dalam pengaturan keuangan BUMDes sehingga diperlukan kualitas laporan keuangan yang baik demikian bisa memberi kontribusi keuangan pada oknum eksternal. kualitas laporan keuangan bisa diperani oleh beberapa unsur terutama unsur internalal yakni dari dalam struktur karyawan BUMDes itu sendiri.

Rosdiani (2013) mengemukakan bahwasanya kualitas laporan keuangan ialah seberapa jauh data pelaporan keuangan yang tersaji memperlihatkan data yang betul beserta jujur. kualitas laporan keuangan berguna menjadi dasar penarikan putusan ekonomi bagi oknum yang mempunyai kepentingan. kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya dipakai dalam putusan investasi, perjanjian kompensasi, persyaratan hutang beserta putusan kontrak yang Beralaskan kualitas laporan keuangan.

Dalam membuat data pelaporan keuangan tentunya diperlukan kapabilitas dasar contohnya pemahaman akuntansi. Pemahaman berasal dari kata maksud yang mempunyai maksud mengerti benar, sementara pemahaman ialah tahap pembuatan cara menelaah ataupun memahamkan. maksud Kamus Umum Bahasa

Indonesia (Poerwadaminta, 2006) mempunyai pemahaman pandai beserta mengerti benar, sementara pemahaman ialah tahap, cara, perbuatan menelaah ataupun memahamkan. individu yang mempunyai pemahaman akuntansi ialah individu yang pandai beserta mengerti betul terkait akuntansi.

Dilain itu di era modern saat ini tidak jarang perangkat BUMDes menerapkan teknologi data menjadi teknologi pembantu dalam melakukan aktivitas akuntansi yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah praktik yang dimaknai dengan SIA. SIA ialah sejumlah komponen yang saling berketerikatan yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, beserta medistribusikan data untuk memperkuat pembuatan putusan beserta pengawasan dalam kelompok (Laudon & Laudon, 2000). Akuntansi beserta SIA bertolak dari sebuah landasan yang diantaranya berbagai rancangan, yakni rancangan terkait akuntansi itu sendiri, rancangan sistem, rancangan informasi, rancangan kelompok beserta rancangan penarikan putusan (Afifah, 2009).

Selanjutnya dalam strategi menciptakan program Pemda Kabupaten Badung dalam mengatasi hambatan permodalan bisnis beserta penguatan penerapan pembaruan PUSAKA SAKTI BADUNG yakni dengan literasi keuangan desa. Literasi keuangan menjadi jauh cenderung krusial setelah terindikasinya *financial distress* beserta menjadi prasyarat yang bercapaian untuk menghindari krisis keuangan dengan menggapai stabilitas keuangan. terdapat demensi yang dipakai dalam leterasi keuangan yang dipakai oleh pengujian (Aribawa, 2016). pengujian yang dilaksanakan Daniel et al., (2002) memperlihatkan bahwasanya evaluasi ahli mutu publikasi keuangan cenderung kuat terkait dengan penilaian mereka pada karakteristik mutu publikasi yang mendasari (misalnya, nyatasi) yang dianut

dalam kerangka Pernyataan rancangan Akuntansi Keuangan No. 2 daripada evaluasi literasi.

Kualitas laporan keuangan BUMDes bisa memberi peran di BUMDes itu sendiri dilain itu pula bisa memberikna data pada oknum eksternal beserta menghindari asimetri informasi. Asimetri data (*information asymmetry*) ialah beberapa oknum dalam transaksi bisnis mempunyai cenderung banyak data dibandingkan oknum lainnya ataupun ketidakseimbangan perolehan infomasi diantara oknum tata kelola menjadi penyedia data (*prepaper*) dengan oknum pemegang saham beserta stakeholder pada umumnya menjadi pemakai data (Scott, 2009:7). Asimetri data muncul bilamana manajer cenderung banyak melihat data internalal beserta prospek emiten di masa mendatang dibandingkan pemegang saham beserta stakeholder lainnya. BUMDes yang ialah satu diantara unit bisnis yang sumber dananya berasal dari Dana Desa. sehingga dari itu, Direktur BUMDes sebaiknya menyediakan data pelaporan keuangan yang sama dengan standarisasi akuntansi dengan umum supaya data pelaporan keuangan yang akan dilaporkan pada musyawarah desa bisa dipertanggungjawabkan pada oknum yang mempunyai kekrusialan. terdapatnya data pelaporan keuangan tersebut guna mencegah terdapatnya asimetri data dari oknum BUMDes pada oknum Desa selaku penyedia dana.

Ada beberapa pengujian lainnya yang dilaksanakan oleh penguji terdahulu terkait unsur-unsur yang bisa memberi peran pada kualitas laporan keuangan yakni oleh Ahmad Khasif Khusaini (2022), yang berjudul “kualitas laporan keuangan Badan bisnis Milik Desa”. Dari temuan pengujian tersebut yakni bahwasanya (1) taraf pendidikan berperan positif pada kualitas laporan keuangan

BUMDes; (2) Pemahaman akuntansi berperan positif pada kualitas laporan keuangan BUMDes; (3) pendayagunaan teknologi data berperan pada kualitas laporan keuangan BUMDes; (4) Pengendalian internal berperan positif pada kualitas laporan keuangan BUMDes. perihal serupa yang dilaksanakan oleh penguji yakni Ni Luh Wayan Tiya Lestari beserta Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), yang berjudul “peran Pemahaman Akuntansi, pendayagunaan SIA beserta praktik pengawasan internal pada kualitas laporan keuangan”. temuan pengujian yang dilaksanakan memperlihatkan bahwasanya pemahaman akuntansi, pendayagunaan SIA, beserta praktik pengawasan internal berperan dengan individual beserta bersamaan pada kualitas laporan keuangan. selanjutnya pengujian terkait literasi keuangan di BUMDes masih jarang dilaksanakan demikian pengujian terdahulu yang dipakai menjadi acuan ialah pengujian yang dilaksanakan oleh Hermi Sularsih (2021) dengan judul “Literasi Keuangan, Teknologi praktik Informasi, pengawasan internal beserta kualitas laporan keuangan UMKM”, temuan peneliti ini memperlihatkan bahwasanya literasi keuangan (X1), teknologi sistem informasi (X2), berperan pada kualitas laporan keuangan UMKM di zaman revolusi 4.0 sementara untuk pengawasan internal (X3) berperan tetapi tidak substansial pada kualitas laporan keuangan UMKM di era revolusi 4.0.

Beralaskan uraian latar belakang tersebut sehingga penguji tertarik untuk melakukan pengujian yang berjudul **“peran Pemahaman Akuntansi, penerapan SIA beserta Literasi Keuangan pada kualitas laporan keuangan BUMDes di BUMDes Se-Kabupaten Badung”**.

1.2 Identifikasi Persoalan

Beralaskan latar belakang persoalan pengujian yang sudah dipaparkan diatas, sehingga penguji bisa mengidentifikasi persoalan yang terdapat di pengujian ini yakni:

- a. Adanya persoalan yang terdapat di warga desa di Kabupaten Badung dalam menumbuh kembangkan usaha, terutamanya bisnis ultra mikro. yang mana yang menjadi hambatan pokok bagi pengembangan bisnis ultra mikro ialah bagian permodalan.
- b. Terdapat ketetapan yang terkandung dalam kebijakan Menteri Keuangan No. 193/PMK.05/2018 terkait Pembiayaan Ultra Mikro. perihal ini yang menghambat akses pada berbagai layanan keuangan formal. sehingga Pemda Kabupaten Badung meluncurkan program PUSAKA SAKTI BADUNG. menjadi strategi penguatan pada penerapan pembaruan PUSAKA SAKTI BADUNG, Dinas pendayagunaan warga beserta Desa Kabupaten Badung akan membuat kebijakan Bupati terkait BUMDes menjadi bagian dari inklusi beserta literasi keuangan di Desa.
- c. Diperlukan peran beserta dari komponen BUMDes untuk bisa mensukseskan program PUSAKA SAKTI BADUNG yang mana dalam perihal ini berkaitan dengan pengaturan BUMDes supaya selanjutnya BUMDes bisa mendorong pengembangan permodalan bisnis warga desa dengan melihat dari mutu laporan yang dicapai.
- d. Adanya research gap temuan pengujian yang dilaksanakan pada pengujian sebelumnya terkait peran pemahaman akuntansi, penyelenggaraan system

data akuntansi beserta literasi keuangan pada kualitas laporan keuangan pada kualitas laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Persoalan

Batasan persoalan sangat krusial guna memfokuskan pengujian pada beberapa persoalan pula senada dengan variabel pengujian. demikian pengujian hanya memfokuskan pengujian ini pada peran pemahaman akuntansi, penyelenggaraan system data akuntansi beserta literasi keuangan pada kualitas laporan keuangan BUMDes.

1.4 Rumusan Persoalan

Beralaskan uraian latar belakang masalah, identifikasi persoalan beserta pembatasan persoalan diatas, terdapat rumusan masalah:

- (1) Apakah Pemahaman Akuntansi berperan pada kualitas laporan keuangan BUMDes se-Kabupaten Badung?
- (2) Apakah penerapan SIA berperan pada kualitas laporan keuangan BUMDes se-Kabupaten Badung?
- (3) Apakah Literasi Keuangan berperan pada kualitas laporan keuangan BUMDes se-Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Pengujian

Beralaskan rumusan persoalan tersebut, sehingga capaian yang ingin dicapai dalam peneltian ini yakni:

- (1) Untuk melihat peran Pemahaman Akuntansi pada kualitas laporan keuangan BUMDes se-Kabupaten Badung.
- (2) Untuk melihat peran penerapan SIA pada kualitas laporan keuangan BUMDes se-Kabupaten Badung.
- (3) Untuk melihat peran Literasi Keuangan pada kualitas laporan keuangan BUMDes se-Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat Pengujian

(1) Manfaat Teoritis

Pengujian ini diinginkan berguna untuk menumbuhkembangkan beserta mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapat di bangku kuliah dengan kebenaran yang terdapat di lapangan beserta pengujian ini diinginkan memberi wawasan luas terkait kualitas laporan keuangan di BUMDes.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

Hasil pengujian ini diinginkan bisa mendorong oknum BUMDes dalam mengevaluasi data pelaporan keuangan melalui data yang didapat di pengujian ini, terutamanya terkait pemahaman akuntansi, penyelenggaraan system data akuntansi, literasi keuangan beserta kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Pengujian ini diinginkan dapat menambah sumber referensi bagi penguji selanjutnya beserta memberi data berkaitan dengan pemahaman akuntansi, penyelenggaraan system data akuntansi, literasi keuangan pada kualitas laporan keuangan BUMDes.

c. Bagi penguji selanjutnya

Hasil dari pengujian ini diinginkan bisa dijadikan sumber data tambahan bagi penguji selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk menumbuhkembangkan pengujian ini demikian mendapat temuan yang cenderung baik.

